



LOGIKA BIOPOLITIK DALAM KEBIJAKAN PPKM

Strategi Mengatasi Krisis
Kesehatan dan Sosial
dalam Covid-19

litnus.

LOGIKA BIOPOLITIK DALAM KEBIJAKAN PPKM

Strategi Mengatasi Krisis
Kesehatan dan Sosial
dalam Covid-19

Dr. Siti Aminah

**LOGIKA BIOPOLITIK DALAM KEBIJAKAN PPKM:
STRATEGI MENGATASI KRISIS KESSEHATAN DAN SOSIAL
DALAM COVID-19**

Ditulis oleh :

Dr. Siti Aminah

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Desember 2024

Perancang sampul: Noufal Fahriza

Penata letak: Noufal Fahriza

ISBN : 978-634-206-612-6

viii + 102 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Desember 2024



KATA PENGANTAR

Pandemi COVID-19 dan kebijakan yang mengikutinya telah memunculkan tantangan multidimensional, terutama terkait pendefinisian ulang tentang tata kelola yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengatur kehidupan warganya. Respons dari situasi darurat ini berupa adaptasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari skema Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan bagian dari perspektif biopolitik. Untuk itu, buku ini hadir dari refleksi terhadap situasi tersebut yang tidak hanya berpengaruh pada ketahanan fisik masyarakat, tetapi justru membentuk ulang berbagai dimensi sosial politik di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Negara memanifestasikan biopolitik melalui pengendalian ruang publik, kontrol aparat, hingga pengelolaan risiko. Oleh sebabnya, proses kebijakan yang dihasilkan dapat merumuskan dialektika kompleks di antara kebutuhan menekan penyebaran virus/upaya mitigasi, tetapi juga harus menghadapi resistensi sosial dan memastikan keberlanjutan ekonomi dan kehidupan warga masyarakat.

Bertitik tolak dari hal di atas, kajian ini hendak mengupas lebih dalam terkait relasi kekuasaan, strategi pemerintah, serta efeknya terhadap masyarakat secara individual maupun kolektif dari langkah-langkah pegendalian krisis yang dipimpin oleh negara. Langkah tinjauan yang digunakan dalam buku ini akan menggali tentang bagaimana keputusan diambil oleh *decision makers* selama PSBB dapat membentuk pengawasan dan kontrol yang di lain sisi menimbulkan keterbatasan, terutama dalam merespons masyarakat

rentan. Sehingga proses kebijakan dapat terlihat sebagai representasi dari biopolitik atau “politik kehidupan” ketika keselamatan masyarakat bersinggungan atau tarik-menarik dengan kebebasan individu.

Sebagaimana Teori Panoptisisme yang dikembangkan oleh Michel Foucault, serta kritik Giorgio Agamben terhadap situasi darurat, maka pendekatan biopolitik diklasifikasikan sebagai kerangka biopolitik modern untuk meninjau PSBB dan PPKM sebagai instrumen kekuasaan, lalu mengeksplorasi unsur intervensi negara atas kehidupan manusia yang mana produk kebijakan berorientasi pada penyebaran dan perkembangan virus, aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Melalui pendekatan interdisipliner, buku ini diharapkan mampu menjadi referensi yang menghubungkan teori politik dengan praktik kebijakan serta sebagai sudut pandang bagi pembaca untuk memahami biopolitik yang bekerja dalam situasi darurat, khususnya di wilayah Jawa Timur. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis, baik bagi para akademisi, pengambil kebijakan, aktor politik, pemerhati sosial-politik, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam mengartikan kompleksitas hubungan antara kekuasaan, masyarakat, dan resistensi di kondisi pandemi melalui perspektif biopolitik.

Surabaya, Desember 2024

Dr. Siti Aminah



UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Rektor Universitas Airlangga atas dukungan dan fasilitas pendanaan penelitian dalam skema Kontrak Pelaksanaan Penelitian Unggulan Fakultas Universitas Airlangga Tahun 2021 Nomor: 1870/UN3.1.7/PT/2021. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga atas arahan dan dukungan moral yang membantu jalannya penyusunan buku ini sebagai bentuk karya untuk berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan berlandaskan realisasi Tri-dharma.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih	v
Daftar Isi	vii

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

Pengantar.....	1
PPKM: Kebijakan Biopolitik.....	4
Covid-19: Fenomena Sosial dan Medis.....	6

BAB 2 BIOPOLITIK, COVID-19, DAN PSBB: KONTESTASI KEBIJAKAN 15

Pengantar.....	15
Konsep Biopolitik dan <i>Biopower</i>	16
Biopolitik dan Pemformatan Ulang Kebebasan	18
Bipolitik dan Kekuasaan Disipliner	20
Biopolitik: Pendisiplinan dan Karantina.....	24

BAB 3 REGULASI KEBIJAKAN NEGARA DAN PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF BIOPOLITIK..... 29

Pengantar.....	29
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali	31
PPKM Mikro dan Lockdown (<i>Kuncitara</i>).....	33
PPKM Mikro dan WFH/WFO	36

Gambaran Umum Praktik PPKM Makro/Mikro di Surabaya..	44
Gambaran Umum Praktik PPKM Makro/Mikro di Gresik	46

BAB 4 BIOPOLITIK DAN AKSI PROTES DAN PERLAWANAN MASYARAKAT ... 51

Pengantar.....	51
Penolakan Masyarakat terhadap PPKM	52
Biopolitik–PPKM di Surabaya.....	53
Contoh Penolakan Masyarakat terhadap Perpanjangan PPKM	62
Biopolitik–PPKM di Gresik	63
Kabupaten Gresik	65
Pandangan tentang Sanksi bagi Pelanggar Prokes dan PPKM.....	66
PPKM: Melindungi Kedaulatan Negara dan Populasi	71
PPKM dan Penerapan Konsep Panopticon.....	73
<i>New Normal</i> : Normalisasi Abnormal	75
Kepatuhan dan Dampak Terhadap Ekonomi	75
Penegakan Sanksi terhadap Pelanggar Prokes dan PPKM	83

BAB 5 REFLEKSI KRITIS.....89

Daftar Pustaka	95
----------------------	----



PENDAHULUAN

Pengantar

Pemandangan dan suasana kota berubah begitu dramatis saat pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB dan PPKM.¹ Pintu masuk ke dalam kota atau daerah ditutup dan orang-orang dikurung di rumah mereka sendiri. Orang-orang (populasi) dihimbau dan selalu diingatkan oleh pemerintah melalui aparaturnya yang bertugas di lapangan seperti Satpol PP, Satgas Covid-19, TNI, Polri, dan juga sukarelawan untuk tidak keluar rumah. PPKM sebagai bentuk kebijakan dari implementasi biopolitik yang beroperasi sampai di tingkat RT (Rukun Tetangga). Jalan-jalan dan semua ruang publik (mal, plaza, taman-taman kota, alun-alun, pasar tradisional) dijaga oleh petugas pengawas Covid-19 (Corona Virus 2019) yang berjaga dan berfungsi memeriksa kepatuhan populasi dalam menjalankan proses.

Penerapan kebijakan PPKM yang paling ketat berupa kebijakan pembatasan kegiatan untuk Jawa dan Bali. Tetapi, kali ini Pemerintah tidak lagi menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tetapi menggunakan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penetapan resmi Pemerintah tentang

kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali berlaku mulai 11-25 Januari 2021.

Kebijakan PPKM menjadi resmi digunakan pemerintah untuk menggantikan istilah PSBB. Kebijakan dalam PPKM dinilai pemerintah sebagai upaya menangani pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. Kebijakan ini membatasi kegiatan masyarakat pada tingkat yang bersifat mikro. PPKM dilaksanakan per daerah yang mengalami lonjakan tinggi kasus Covid-19. Tingkat penyebaran kasusnya dilihat pada tingkat RW/RT dari jumlah rumah yang terpapar pandemi Covid-19. Kini, pemerintah menyusun PPKM mikro darurat seiring dengan lonjakan kasus virus corona di Indonesia. Rencananya, pembatasan aktivitasnya diperluas ke zona oranye atau beresiko sedang dari sebelumnya hanya di zona merah saja.

Tujuannya menekan angka penularan virus Corona (Covid-19). Pemerintah menggunakan istilah PPKM bukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan PSBB tujuannya untuk menekan laju penyebaran virus corona. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Berdasarkan Permenkes tersebut, PSBB adalah pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona. Mekanisme kebijakannya, dimulai dari gubernur, bupati, atau walikota mengusulkan PSBB di daerahnya. Kemudian, menteri yang menetapkan persetujuannya.

Syarat bagi wilayah yang harus melakukan PSBB adalah jumlah kasus dan kematian Covid-19 meningkat signifikan. Setelah disetujui, pembatasan ini diterapkan di lingkup wilayah tertentu. Bisa provinsi, kabupaten atau kota. Pembatasan kegiatan pada PSBB dapat meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja. ([Covid19.go.id](https://covid19.go.id)) PPKM ini melibatkan berbagai elemen masyarakat di tingkat bawah. Mulai dari ketua RT/RW, kepala desa/lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) hingga karang taruna.



BIOPOLITIK, COVID-19, DAN PSBB: KONTESTASI KEBIJAKAN

Pengantar

Lensa biopolitik menjelaskan dua hal: bahwa biopolitik adalah politik kerentanan yang berbeda yang melekat pada modernitas kapitalis, dan bahwa situasi virus corona oleh karena itu, situasi virus corona secara signifikan lebih kecil dari kondisi pengecualian daripada yang terlihat. Sebaliknya, COVID-19 adalah sebuah kelanjutan dan intensifikasi biopolitik kapitalis dari kerentanan yang berbeda. Untuk mengevaluasi secara kritis situasi ini, saya mengusulkan konsep "biopolitik demokratis" dan menunjukkan bagaimana dapat digunakan untuk melakukan kritik terhadap kerentanan yang berbeda yang diproduksi oleh korporasi dan pemerintahan kapitalis dan Coronavirus dan tata kelola kapitalisnya. Berbeda dengan interpretasi lain dari biopolitik demokratis,

Dalam konteks ini, Saya menyoroti peran negara dan bukannya kepedulian kolektif masyarakat (Sotiris, 2020; Schaffar, 2020). Biopolitik populis, menurut saya, memadukan kerentanan yang

berbeda dengan membangun sebuah rezim biopolitik absolut atas nama rakyat, mengedepankan kesehatan atau individu. individu sebagai nilai yang tidak perlu dipertanyakan lagi yang harus dilindungi dengan cara apa pun.

Konsep Biopolitik dan *Biopower*

Menurut Foucault kehidupan manusia dalam totalitasnya menjadi objek kekuasaan dan pengetahuan. Dalam kerangka ini, biopower dan biopolitik pada dasarnya terkait dengan sistem norma tertentu yang menciptakan efek kekuatannya melalui kedokteran, ilmu pengetahuan manusia, dan peraturan perundang-undangan. Konsepsi tentang "biopolitik" diciptakan oleh Michel

Foucault dimana Foucault prihatin dengan kekuasaan, yaitu, dengan bagaimana orang diatur, teknik apa yang digunakan untuk pemerintahan, dan bagaimana hal ini berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Biopolitik, menurutnya, adalah bentuk kekuasaan tertentu yang muncul pada akhir abad ke-18 dan ke-19, dan yang masih membentuk masa kini. Biopolitik berarti, pemerintah telah mengambil kehidupan, atau lebih tepatnya populasi dan kesehatan, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dll., sebagai objek baru mereka.

Teknologi kekuasaan baru, dan jenis-jenis baru baru, seperti pengetahuan medis dan statistik, dikembangkan untuk mempengaruhi populasi. Pengawasan dan kontrol seksualitas, serta sistem asuransi dan kesejahteraan yang muncul asuransi dan kesejahteraan, merupakan hal yang sentral. Foucault menggambarkan hal ini sebagai perpecahan sejarah: Belum pernah sebelumnya politik menjadi politik bertanggung jawab untuk mengawasi proses biologis dengan begitu dekat dan dengan cara yang ilmiah dan sistematis.

Dalam ilmu politik, istilah "biopolitik" cenderung memiliki dua arti yang bersaing dan tidak dapat didamaikan. Makna pertama dikembangkan oleh para sarjana di Amerika Serikat pada 1970-an



REGULASI KEBIJAKAN NEGARA DAN PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF BIOPOLITIK

Pengantar

Masyarakat belum paham tentang PSBB dan PPKM di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Menjaga jarak sosial sangat penting dalam memperlambat penyebaran infeksi virus corona baru (COVID-19), namun beberapa orang tidak mengikuti rekomendasi awal untuk membatasi kontak fisik dengan orang lain. Selain itu, pelarangan pemerintah untuk tidak berinteraksi dengan orang lain belum bisa dimengerti dengan baik. Hal ini dilatari oleh asumsi: pertama bahwa semakin lama masyarakat melakukan interaksi secara langsung dipastikan, semakin tinggi risiko penyebaran Covid-19.

Asumsi kedua adalah, jika kita Anda memutuskan untuk terlibat dalam aktivitas public dengan terus menerus memperhatikan dan menerapkan protocol Kesehatan untuk melindungi diri kita berarti kita memiliki kesadaran tentang dampak negative Covid-19 yang dapat

membunuh siapapun diri kita. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman tentang perlunya menghindari kerumunan dan mengurangi aktivitas di luar rumah adalah penting dalam masa Pandemi Covid- 19 dan karena itu kita semua harus mempraktikkan tindakan pencegahan untuk melakukan aktivitas di luar rumah sehari-hari. Hal ini juga untuk memberikan edukasi secara tidak langsung kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga jarak dalam berinteraksi untuk mengurangi tingkat penularan Covid-19.

Bagian ini menjelaskan tantangan dan kendala yang dihadapi pemerintah saat implementasi kebijakan PSBB (Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Kebijakan ini adalah sebagai kebijakan untuk menjamin keselamatan masyarakat dari pandemic Covid-19. Penerapan PPKM untuk Pulau Jawa dan Bali telah resmi diberlakukan pada periode 11–25 Januari 2021. Menteri Dalam Negeri pun telah mengeluarkan Instruksi No. 1 Tahun 2021 untuk memastikan PPKM berjalan dengan baik dan sejauh ini telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Lebih dari itu dari lensa biopolitik, kebijakan PPKM bukan saja sebagai kebijakan pembatasan kegiatan yang diberlakukan sebagai upaya menjamin keselamatan masyarakat ditengah peningkatan kasus Covid-19 yang masih tinggi.

Dalam bahasan ini, saya menjelaskan tentang isi dari kebijakan-kebijakan PPKM dan implementasinya. Dalam paparan ini, penjelasan fokus pada implementasi kebijakan PPKM di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Dua daerah ini adalah daerah industry dimana implementasi PPKM memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Ini bukan hal mudah karena di lapangan banyak sekali ditemukan penolakan dan protes atas penerapan kebijakan oleh masyarakat. Gelombang protes masyarakat tak terelakkan saat di Kab. Bangkalan angka Covid-19 meningkat pesat.



BIOPOLITIK DAN AKSI PROTES DAN PERLAWANAN MASYARAKAT

Pengantar

Seiring dengan semakin banyaknya manusia di dunia yang telah divaksinasi dan keluar dari karantina wilayah, tidak langsung menghentikan pandemi Covid-19 itu. Masih banyak orang berbicara tentang apakah upaya melawan pandemi ini terlalu kuat atau terlalu lemah. Beberapa orang berpendapat bahwa pembatasan tidak cukup kuat; yang lain berpendapat bahwa upaya penyembuhan yang dilakukan justru lebih buruk daripada penyakitnya. Salah satu alasan dari pandangan yang saling bertentangan ini adalah karena jawabannya bergantung pada fakta dan nilai.

Data kajian ini menunjukkan fakta bahwa kebijakan pemerintah sering kali dipandu oleh temuan-temuan ilmiah untuk mengurangi penyebaran virus dan penyakit serta kematian yang diakibatkannya. Nilai-nilai yang relevan termasuk kesehatan dan umur panjang, tetapi

juga kemakmuran, kesempatan, kesetaraan, dan kebebasan. Setiap orang menimbang nilai-nilai tersebut secara berbeda. Tidak semua lapisan masyarakat menerima dan menjalankan PPKM. Artinya ada gelombang protes dari masyarakat yang menolak kebijakan itu, terutama ketika pemerintah menerapkan kebijakan lockdown, swab, vaksinasi, dll.

Dengan lonjakan kasus Covid-19 di Kab. Bangkalan, Pemkot Surabaya menyikapi dan meresponnya dengan kebijakan yang kontraproduktif. Meningkatnya angka kasus Covid-19 di Bangkalan ini direspon oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan memberlakukan beberapa kebijakan penyekatan di pintu keluar Jembatan Suramadu, penerapan “test Swab” dan operasi penggunaan masker. Banyak hal yang belum bisa dipahami oleh masyarakat dari kebijakan PPKM ini, karena kebijakan ini justru dipandang sebagai hal yang merugikan hidupnya.

Penolakan Masyarakat terhadap PPKM

Di Jawa Tiuur, terutama Surabaya dan Gresik sebagai dunia memang tidak sempurna, keputusan para pembuat kebijakan di dua daerah itu didasarkan pada bukti dan data tentang lonjakan orang meninggal karena Covid-19. Namun, ilmu pengetahuan dan data yang penting bagi sebagian orang berbeda dengan ilmu pengetahuan dan data yang penting bagi orang lain. Haruskah pemerintah memprioritaskan kesehatan masyarakat dengan mengorbankan ekonomi? Haruskah individu mengorbankan kebebasan demi kebaikan sosial?

Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia dan Jawa Timur khususnya (Surabaya dan Gresik) dapat mencurahkan seluruh sumberdaya masyarakat untuk memerangi virus corona, tetapi dengan melakukan hal itu berarti mengabaikan semua penyakit lain dan prioritas pribadi yang membuat hidup menjadi lebih baik.



REFLEKSI KRITIS

Biopolitik ini terbukti di Indonesia, dari jalinan wacana pengawasan dan keamanan, sebagaimana dibuktikan oleh wacana abad ke-21 seputar sebuah tindakan melindungi jiwa manusia melalui PPKM/PSBB, *lockdown* dan lain-lain. Jenis intervensi politik oleh negara ini masuk ke dalam ranah biopolitik. Ada tiga garis singgung pemikiran dalam Foucault yang relevan dengan eksplorasi Indonesia tentang pandemi. Pertama, logika penularan pada subjek sebagai tubuh individu yang membutuhkan pandangan klinis dan logika penularan yang berkaitan dengan pengendalian massa. Kedua adalah apa yang disebut Foucault sebagai diskriminasi, dan logika pembuangan kehidupan manusia saat memasuki negara biopolitik.

Negara menjadi diskriminatif karena menganggap bagian tertentu dari populasi tidak layak untuk hidup. Akhirnya, ada kebijakan yang memberikan titik tekan pada ekonomi perawatan di mana negara memberikan izin untuk membuka warung atau mall dan kantor, sekolah yang tidak *full lockdown*. Ini sebagai bukti dari negara biopolitik. Munculnya biopower telah difasilitasi oleh logika gelombang pertama dan kedua pandemi yang merusak di India. Pemerintahan biopolitik negara Indonesia beroperasi pada beberapa tingkatan untuk mempolitisasi "kehidupan itu sendiri". Hal ini

terlihat dari logika penularan yang didasarkan pada gagasan persepsi ancaman dan risiko, rasisme melalui gagasan bahwa bagian tertentu dari populasi dapat dibuang, serta melalui ekonomi dan penolakan pemerintah untuk berpartisipasi dalam kesejahteraan warga negara.

Saya berpendapat bahwa upaya bantuan tak ternilai yang dilakukan oleh aktor non-pemerintah seperti LSM, masyarakat di tingkat Rukun tetangga, Rukun warga, dan para sukarelawan juga mengikuti logika biopolitik untuk menghidupkan, tetapi menyimpang dari alasan keberadaan negara biopolitik. Ini adalah negara yang berinvestasi pada dirinya sendiri dan menggunakan logika kehidupan manusia sebagai sarana untuk membenarkan keberadaannya sendiri.

Dengan demikian, biopolitik pada dasarnya adalah tentang perlakuan yang tidak setara, yang melekat pada kapitalisme modern dan didasarkan pada eksploitasi, seksisme, dan rasisme: Biopolitik berarti membuat perbedaan, mengekspos beberapa risiko yang lebih besar daripada yang lain, dan menawarkan perlindungan yang lebih besar daripada yang lain. Oleh karena itu bisa disebut bahwa biopolitik sebagai politik "kerentanan diferensial". Kebijakan PPKM sebagai wujud dari kebijakan Biopolitik berisi tentang selalu kebijakan memberikan perlindungan kepada rakyat dan mengekspos orang lain pada kerentanan yang paling ekstrem dan bisa mengakibatkan kematian.

Kita juga bisa memahami bahawa dibalik krisis Covid-19 yang sangat dahsyat itu sesungguhnya kita telah melihat upaya pemerintah Indonesia sudah membuat rezim biopolitik menjadi telanjang, menunjukkan tingkat intrusi yang siap dilakukan oleh negara dan cengkeraman struktur kekuasaan negara terhadap biologi manusia. Ketika tubuh manusia menjadi tersekritisasi, jumlah dan kedalaman represi demokratis pun meluas, dan hal ini dapat dilakukan sebagian besar dengan dukungan publik karena dugaan pengurangan risiko tubuh menjadi nilai jual dari ketundukan yang mendalam. Sebagai hasilnya, makalah ini menyimpulkan dengan membingkai situasi saat ini sebagai pilihan yang menentukan: apakah masyarakat akan

DAFTAR PUSTAKA

- Agamben, George (2020). The Invention of An Epidemic. *European Journal of Psychoanalysis* 26 February <http://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers> (diakses 22 Januari 2021).
- Agamben, G. (1998), *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, Stanford: Stanford University Press.
- Agamben, G. (2000), *Means without End: Notes on Politics*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Agamben, G. (2004), *The Open: Man and Animal*, Stanford: Stanford University Press.
- Agamben, G. (2007), *Infancy and History: On the Destruction of Experience*, London: Verso.
- Agamben, G. (2013), *Opus Dei: An Archaeology of Duty*, Stanford: Stanford University Press.
- Arendt, H. (1973), *The Origins of Totalitarianism*, New York: Harcourt.
- Barnes, S. (2011), *Death and Redemption: The Gulag and the Shaping of Soviet Society*, Princeton: Princeton University Press.
- Banerjee D, Kallivayalil RA, Sathyanarayana, Rao TS.(2020). The 'othering' in pandemics: prejudice and orientalism in COVID-19. *Indian Journal of Social Psychiatry*, DOI: 10.4103/ijsp.ijsp_261_20, diakses 10 Oktober 2022.

- Bieber, F. (2020) Global nationalism in times of the Covid-19 pandemic. *Nationalities Papers* 1–13. <https://doi.org/10.1017/nps.2020.35>
- Bird Greg, Lynch Heather (2019) Introduction to the politics of life: A biopolitical mess. *European Journal of Social Theory*, Vol.22. Issue 3, August [https://progressivegeographies.com/2019/08/14/special-issue-the-politics-of-life-european-journal-of-social-theory-](https://progressivegeographies.com/2019/08/14/special-issue-the-politics-of-life-european-journal-of-social-theory-2019/) 2019/ (diakses 15 Januari 2021).
- Chung EA (2020) COVID-19 and the dynamic of race and othering. Part of the webcast series: ANF Agora Conversations: the politics and policy of COVID-19. April 24, Available via https://www.youtube.com/watch?v=0OTm_YdiII0, diakses 18 September 2021.
- Clarke, A. (2005) *Situational analysis: a grounded theory after the postmodern turn*. Sage Publications, London.
- Cresswell, T. (1996) *In place/out of place: geography, ideology, and transgression*. University of Minnesota Press, Minneapolis.
- Campbell T (2011) *Improper Life: Technology and Biopolitics from Heidegger to Agamben*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Collier S (2009) Topologies of power: Foucault's analysis of political government beyond "governmentality". *Theory, Culture, and Society* 26(6):78-108.
- Collier, S. (2011), *Post-Soviet Social: Neoliberalism, Social Modernity, Biopolitics*, Princeton: Princeton University Press.
- Davidson, Arnold I. (ed.) (2009). *Michel Foucault: Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977-1978*. Translated by Graham Burchell. London: Palgrave MacMillan.
- Debord, G. (1994), *The Society of the Spectacle*, New York: Zone Books.

- Debord, G. (2011), *Comments on the Society of the Spectacle*, London: Verso.
- Dobrenko, E. (2007), *The Political Economy of Socialist Realism*, New Haven: Yale University Press.
- Denisenko, V., Trikoz, E., People. (2020). Biopolitics and legal issues of emergency situations in the context of coronavirus pandemic. (<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017514013>, diakses 19 Juli 2022)
- De Rosa, AS, Mannarini, T. (2021). Covid-19 as an ‘invisible other’ and socio-spatial distancing within a one-metre individual bubble. *Urban Design Int* <https://doi.org/10.1057/s41289-021-00151-z>, diakses 10 November 2022.
- Dionne, KY, Turkmen, FF. (2020) The politics of pandemic othering: putting COVID-19 in global and historical context. *Int Organ* 74(S1):E213–E230. (https://ideas.repec.org/a/cup/intorg/v74y-2020is1pe213-e230_11.html, diakses 5 Juli 2022).
- Esposito, R. (2008). *Bíos: Biopolitics and Philosophy*, Minneapolis and London: University of Minnesota Press.
- Esposito, R. (2009), *Communitas: The Origin and Destiny of Community*, Stanford: Stanford University Press.
- Esposito R (2013) Community, immunity, biopolitics. *Trans. Z Hana-fi. Angelaki* 18(3): 83–90.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (trans. A Sheridan). New York: Penguin.
- Foucault M (1978). *The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction* (trans R Hurley). New York: Random House.
- Foucault, M. (1990). *History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*, New York: Vintage Books.

- Foucault, M. (2003). 'Society Must Be Defended': Lectures at the Collège de France, 1975–76, New York: Picador.
- Foucault, M. (2010). The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979, terj.. oleh G. Burchell, London: Palgrave Macmillan.
- Gambetti Z (2020) Politics of life vs. politics of death. Critical Times. Available via <https://ctjournal.org/2020/05/19/politics-of-life-vs-politics-of-death/> Accessed 27 May 2020.
- Gregory D, Johnston R, Pratt G, Watts M, Whatmore S. (eds) (2009) The dictionary of human geography. 5th edn. UK:Wiley- Blackwell, Oxford.
- Hatzikidi. K. (2020). The worst is not over yet: the lives and deaths of the 'self' and 'others' in Brazil's response to the COVID-19 pandemic. Bull Latin Am Res 39(S1):71–74 (DOI:10.1111/blrar.13187, diakses 15 Juli 2021).
- Hawkins. D. (2020). Differential occupational risk for COVID-19 and other infection exposure according to race and ethnicity. Am J Ind Med 2020:1–4. <https://doi.org/10.1002/ajim.23145>, diakses 15 Juli 2021).
- Hornsey MJ, Chapman CM, Alvarez B, Bentley S, Salvador Casara BG, Crimson CR, Ionescu O, Krug H, Selvanathan HP, Steffens NK, Jetten J (2021) To what extent are conspiracy theorists concerned for self versus others? A Covid-19 test case. Eur J Soc Psychol 51(2):285–293. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2737>, diakses 15 Juli 2021).
- Ivić S & Petrović R. (2020). "The rhetoric of othering in a time of pandemic: labeling Covid-19 as a "foreign virus" in public discourse". (<https://www.researchgate.net/publication/345941502>, diakses 5 Maret 2022).

- Klingberg, T. (2020). More than viral: outsiders, others, and the illusions of COVID-19. *Eurasian Geogr Econ* 61(4-5):362– 373. <https://doi.org/10.1080/15387216.2020.1799833>, diakses 5 Maret 2022).
- Kompas.com 29/12/2020. Diakses 20 Januari 2021
- Kompas.com 11/01/2021. Diakses 17 Januari 2021.
- Kritzman (ed.). (tanpa tahun). Michel Foucault: Politics, Philosophy, Culture. Interviews and Other Writings: 1977–1984, London: Routledge.
- Larios L., Paterson, S. (2021) Fear of the other: vulnerabilization, social empathy, and the COVID-19 pandemic in Canada. *Crit Policy Stud* 15(2):137–145., diakses 10 Maret 2021).
- Larson, HJ. (2020) How vaccine rumors start–and why they don’t go away. Oxford University Press, New York.
- Li Y, Nicholson, HL. (2021) When “model minorities” become “yellow peril”–Othering and the racialization of Asian Americans in the COVID-19 pandemic. *Sociol Compass* 15(2):1–13, DOI: 10.1111/soc4.12849, diakses 15 Juli 2021).
- Lemke, T. (2011), Bio-politics: An Introduction, trans. by E.F. Trump, New York and London: New York University Press.
- Loued-Khenissi L, Corradi-Dell’Acqua C (2020) Assessing self-other distinctions through decision-making under risk in the era of Covid-19. *Psyarxiv*, 27 Nov. (<https://doi.org/10.31234/osf.io/qrbza>, diakses 9 Oktober 2022).
- Lozanovska, M., Pieris, A., Haghighi, F., Taylor, W. M., Hou, J., Smith-eram, J., & Chee, L. (2020). Other Spaces of Quarantine. *Fabrications*, 30(3), 416- 429. (<https://doi.org/10.1080/10331867.2020.1857609>, diakses 15 Juli 2021)

- Majia, N. & Nadesan, M. H. (2008) *Governmentality, Biopower, and Everyday Life*. New York: Routledge
- Meli E (2020) Coronavirus, immigrati e vaccino antitubercolare. Come stanno le cose. (https://www.corriere.it/salute/malattie-rare/20_marzo_25/coronavirus-immigrati-vaccino-antitubercolare-come-stanno-cose-f13a84ba-6eb2-11ea-925b-a0c3cd-be1130.shtml, diakses 20 Agustus 2022).
- Memmi, D. (2003) Governing through Speech: The New State Administration of Bodies. *Social Research*. Vol. 70, No. 2 (summer 2003), pp. 645-658. The Johns Hopkins University Press (diakses 8 Januari 2022).
- Neumann, IB. (1999). Uses of the other: “The East” in European identity formation. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Pelizza, A. (2020). “No disease for the others”: How COVID-19 data can enact new and old alterities. *Big Data Soc* 17. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2053951720942542>, diakses 10 Agustus 2022).
- Reny TT, Barreto MA (2020) Xenophobia in the time of pandemic: othering, anti-Asian attitudes, and Covid-19. *Polit Group Identity* 1–24. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21565503.2020.1769693?scroll=top&needAccess=true>, diakses 10 Agustus 2022).
- Richter C, Al-Shami A, Khalifa S, Osman S, Mundua S. (2021). The virus of the ‘others’? Corona and discursive othering in Arab media. *J Arab Muslim Media Res* 14(1):3–24.
- Röthmüller, N. (2021). Covid-19. Borders, world-making, and fear of others. *Res Glob* 3:100036. <https://doi.org/10.1016/j.res-glo.2021.100036>, diakses 10 Juli 2022.
- Rogers, A., Castree, N., & Kitchin, R. (2013). biopolitics. In *A Dictionary of Human Geography*. Oxford: Oxford University Press.

- Said, EW. (1979). *Orientalism*. NY: Vintage Books.
- Schirato, Tony., Geoff, D., Jen, W. (2012). *Understanding Foucault: A Critical Introduction*. NY: Allen & Unwin.
- Schmidt T, Cloete A, Davids A, Makola L, Zondi N, Jantjies M. (2020). Myths, misconceptions, othering and stigmatizing responses to Covid-19 in South Africa: a rapid qualitative assessment. *PLoS ONE* 15(12):e0244420. (DOI: DOI: 10.1371/journal.pone.0244420, diakses 15 Juli 2021).
- Ward, PR. (2020). A sociology of the COVID-19 pandemic: a commentary and research agenda for sociologists. *J Sociol* 1–10. First Published July 20. Available via <https://doi.org/10.1177/1440783320939682>, diakses 24 Februari 2022.
- Williams, J. (2020) People of color may be immune to the coronavirus because of melanin. *Black Men Travels*, 22 February. Available via <https://archive.fo/oioB5>, diakses 12 September 2022
- World Health Organization (2020) COVID-19 strategy update. (<https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-strategy-update> 14-april-2020, diakses 19 Desember 2021).

LOGIKA BIOPOLITIK DALAM KEBIJAKAN PPKM

Strategi Mengatasi Krisis
Kesehatan dan Sosial
dalam Covid-19

Pandemi COVID-19 dan kebijakan yang mengikutinya telah memunculkan tantangan multidimensional, terutama terkait pendefinisian ulang tentang tata kelola yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengatur kehidupan warganya. Respons dari situasi darurat ini berupa adaptasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari skema Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan bagian dari perspektif biopolitik. Untuk itu, buku ini hadir dari refleksi terhadap situasi tersebut yang tidak hanya berpengaruh pada ketahanan fisik masyarakat, tetapi justru membentuk ulang berbagai dimensi sosial politik di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Negara memanifestasikan biopolitik melalui pengendalian ruang publik, kontrol aparat, hingga pengelolaan risiko. Oleh sebabnya, proses kebijakan yang dihasilkan dapat merumuskan dialektika kompleks di antara kebutuhan menekan penyebaran virus/upaya mitigasi, tetapi juga harus menghadapi resistensi sosial dan memastikan keberlanjutan ekonomi dan kehidupan warga masyarakat.

Bertitik tolak dari hal di atas, kajian ini hendak mengupas lebih dalam terkait relasi kekuasaan, strategi pemerintah, serta efeknya terhadap masyarakat secara individual maupun kolektif dari langkah-langkah pegendalian krisis yang dipimpin oleh negara. Langkah tinjauan yang digunakan dalam buku ini akan menggali tentang bagaimana keputusan diambil oleh decision makers selama PSBB dapat membentuk pengawasan dan kontrol yang di lain sisi menimbulkan keterbatasan, terutama dalam merespons masyarakat rentan. Sehingga proses kebijakan dapat terlihat sebagai representasi dari biopolitik atau "politik kehidupan" ketika keselamatan masyarakat bersinggungan atau tarik-menarik dengan kebebasan individu.

